



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Topik: Memperluas Praktik Keterbukaan Pemerintah pada Level Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Agustus 2018

Waktu : 14.00-16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD), Kemendagri
2. Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Inovasi Pembangunan Daerah, Kemendagri
3. Biro Perencanaan, Kemendagri
4. Pusat Penerangan, Kemendagri
5. Analis Perencanaan, Kementerian PAN dan RB
6. Bagian Perencanaan, Komisi Informasi Publik
7. Sekretariat SDGs
8. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
9. Medialink
10. *Transparency International* Indonesia (TII)
11. National Democratic Institute
12. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.

2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L
3. Usulan rencana aksi yang akan dibahas terkait dengan Memperluas Praktik Keterbukaan Pemerintah pada Level Pemerintah Daerah
4. Tujuan dari renaksi ini adalah mereplikasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplemenasikan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah.
5. Terkait dengan program keterbukaan pemerintah ini harapannya dapat berintegrasi dengan Kominfo tentang *smart city*, satu data dan SPBE. Metode ini harapannya menjadi program nasional di dorong ke daerah.
6. Beberapa daerah sudah implementasi tentang open government. Misalnya di Makassar didorong melalui pelayanan kesehatan. Ada gap di daerah misalnya ada yang punya ide ada yang tidak punya, sehingga butuh stimulus dari mitra/ swasta/ NGO untuk mendorong inovasi daerah.
7. Dalam identifikasi daerah perlu dilihat masalah utamanya apa, kemudian perumusan inovasi dan juga harus mempertimbangkan komitmen kepala daerah.
8. Dari sisi konsep, sebaiknya perlu disatukan dengan kementerian dan lembaga lainnya agar tidak terjadi kerancuan dalam proses implementasinya.
9. Sudah ada permendagri 3/2017 ada mandat di daerah untuk membentuk PPID, tinggal 83 kabupaten/ kota yang membentuk PPID. Untuk mempermudah OG daerah juga sudah memiliki aplikasi PPID, agar memudahkan memberikan informasi. Berkaitan dengan implementasi aplikasi ini, apakah bisa dipilih daerah-daerah yang mendorong aplikasi PPID agar daerah juga merasa bermanfaat.
10. Untuk menjalankan OG tidaklah mudah, konteks keterbukaan OG tidak hanya membuka informasi saja. Misalnya implementasi smart city tanpa partisipasi juga bukan prinsip OG. Hal ini akan menjadikan OG seakan terkesan kaku, kedepannya perlu dilakukan penajanan dan fleksibilitas OG perlu dilakukan dalam situasi politik dan budaya daerah. Secara nilai bisa digunakan, dalam praktiknya tidak one size fit all.
11. CSO sudah menyusun panduan OG di daerah agar Kementerian juga dapat mempelajari dan membantu substansi terkait dengan praktik keterbukaan pemerintah.

12. Rencana Kemendagri pada tahun 2019 ada program replikasi inovasi daerah. Terkait dengan inovasi pelayanan ada di biro organisasi, Kemendagri.
13. Perlu dilihat bahwa untuk melaksanakan program ini membutuhkan dukungan pendanaan pemerintah daerah. Untuk pemilihan daerah, perlu melihat juga komitmen pemerintah daerah.
14. Penting untuk daerah harus mempertimbangkan kemanfaatan politik dari kepala daerah. Apa investasi yang diberikan dan apa yang harus dibutuhkan. Kalau ada isu yang tentang kebutuhan minimal adalah pelayanan dasar yang di dorong.
15. Dalam evaluasi keterbukaan pemerintah harus ada poin indikator program nasional agar dari daerah dan nasional dapat saling mendorong inisiatif ini.
16. Tindaklanjut, harapannya bappenas memfasilitasi dengan Kominfo dan PUPR untuk sinkronisasi program. Dibuat instrumen program apa yang akan dipilih untuk diusulkan untuk implementasi di daerah. Untuk mendorong implementasi OG bisa di dorong ke enam urusan wajib.
17. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk Renaksi OGI 2018-2020.

Notula Rapat
Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Memperluas Praktik Keterbukaan Pemerintah pada Level Pemerintah Daerah

Latar Belakang :

Inisiatif keterbukaan pemerintah pada level daerah belum diimplementasikan secara masif. Untuk mempercepat akselerasi implementasi keterbukaan pemerintah dibutuhkan panduan yang memuat tentang tahapan, prinsip dan juga kegiatan daerah percontohan yang dapat direplikasi.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Memperluas Praktik Keterbukaan Pemerintah pada Level Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya kapasitas dan rencana aksi <i>open government</i> di 100 Kabupaten/ Kota	1. 100 kota/ kabupaten telah mengikuti penguatan kapasitas yang disediakan oleh OGI 2. 50 kota/ kabupaten telah menyusun rencana aksi	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Informasi dan Komunikasi	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 3. Kantor Staf Presiden